

Nomor : B/710/RB.06/2022
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Tahun 2022

6 Desember 2022

Yth. **Sekretaris Jenderal**
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Di

Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat kesimpulan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Setjen DPR RI tahun 2022 adalah **78,05** dengan kategori "**BB**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	18,32	18,33
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,76	6,80
	III. Reform	30,00	21,10	20,64
	Total Komponen Pengungkit	60,00	45,18	45,77

No	Komponen penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,54	7,71
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,57	9,90
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,49	8,27
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,41	6,40
Total Komponen Hasil		40,00	32,01	32,28
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	77,19	78,05

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Setjen DPR RI telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil.

- Hasil antara area perubahan pada Setjen DPR RI, sebanyak 10 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	2021	2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	291,50	345,50	KASN
2.	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	3,17	3,60	Kementerian Keuangan
3.	ASN Profesional	0-100	40,54	64,54	BKN
4.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	2,84	2,95	Kementerian PANRB
5.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	20,00	9,90	LKPP
6.	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0-100	88,10	94,26	Kementerian Keuangan
7.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,35	4,31	Kementerian PANRB
8.	Kapabilitas APIP	0-5	2+	2	BPKP
9.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
10.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	73,08	77,99	ANRI

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan kualitas pada sebagian besar hasil antara. Dari 10 hasil antara yang dinilai, hanya penilaian terhadap Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang mengalami penurunan pada tahun 2022.

3. Setjen DPR RI telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut sebagian besar rekomendasi yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya, diantaranya yaitu:
 - a. Telah melakukan internalisasi *Core Values* ASN BerAkhlak melalui berbagai metode, salah satunya dengan penyusunan Buku Saku Panduan Perilaku BerAkhlak. Selain itu, Setjen DPR RI telah melakukan survei pemahaman terhadap Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai;
 - b. Telah menyusun laporan *Quick Wins* dan berbagai pemanfaatannya oleh *stakeholder*;
 - c. Telah berupaya meningkatkan kualitas SPBE dari segala aspek terkait seperti penyusunan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan SPBE dan sistem manajemen keamanan informasi Setjen DPR RI, penyelarasan *master plan* SPBE internal, serta peningkatan keamanan SPBE Setjen DPR RI;
 - d. Telah menyusun *roadmap* Sistem Merit Setjen DPR RI 2022-2026 dan telah menerapkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN sehingga penilaian Sistem Merit Setjen DPR RI mengalami perbaikan yang signifikan ditandai dengan diperolehnya skor 345,50 dari KASN dengan kategori "sangat baik".

4. Selain tindak lanjut tersebut, Setjen DPR RI telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun, terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya:
 - a. Dalam manajemen perubahan, telah disusun rencana aksi Agen Perubahan pada masing-masing unit kerja, namun evaluasi rencana aksi agen perubahan tersebut belum dilakukan secara maksimal dan belum ada mekanisme pemberian *reward and acknowledgement* bagi agen perubahan yang proyek perubahannya berhasil;
 - b. Telah meningkatkan kualitas penyusunan peraturan dengan menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, Sekretariat Jenderal DPR RI juga telah menyusun pedoman *Regulatory Impact Assessment* (RIA) sebagai salah satu tahapan penyusunan naskah akademik dalam peraturan perundang-undangan, namun pedoman tersebut belum ditetapkan dalam regulasi yang baku;
 - c. Telah mengembangkan berbagai aplikasi baik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan internal maupun eksternal serta telah berupaya untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi tersebut, namun demikian monitoring dan evaluasi terhadap berbagai aplikasi ini masih harus dioptimalkan supaya pemanfaatannya lebih maksimal;
 - d. Belum seluruh proses bisnis hasil penyesuaian struktur baru telah dituangkan dalam *Standar Operational Procedure* (SOP). Selain itu, evaluasi terhadap

SOP yang telah disusun dan disesuaikan dengan probis yang baru harus lebih dioptimalkan;

- e. Upaya dalam peningkatan manajemen SDM di Setjen DPR RI telah dilakukan, diantaranya dengan asesmen pada sebagian besar pegawai dan pemetaan talenta, namun hasil dari pemetaan talenta yang dilakukan belum sepenuhnya menjadi dasar pemetaan mutasi, rotasi pegawai, pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan penempatan pegawai dalam jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan;
 - f. Pada tahun 2022, Setjen DPR RI telah mengajukan penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 10 unit kerja, namun dari seluruh unit kerja yang diajukan pada tahun 2022, belum ada yang memperoleh predikat WBK/WBBM;
 - g. Hasil survei kepuasan pengguna layanan (*stakeholder*) belum ditindaklanjuti dengan optimal.
5. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Setjen DPR RI memperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	67,28	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	99,00	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	82,71	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	80,11	SPI Internal oleh KPK

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Setjen DPR RI, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Melakukan evaluasi berkala terhadap rencana aksi Agen Perubahan, sehingga proyek perubahan yang dibangun benar-benar dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, perlu didorong mekanisme pemberian penghargaan bagi Agen Perubahan yang telah berhasil membangun atau yang telah sesuai dengan target rencana kerjanya;
2. Menetapkan pedoman *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dalam regulasi yang baku sehingga dapat diterapkan pada proses penyusunan seluruh naskah akademik peraturan perundang-undangan di lingkungan Setjen DPR RI;
3. Melanjutkan proses integrasi berbagai aplikasi yang telah dibangun secara mandiri maupun aplikasi umum berbagi pakai yang ada serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penggunaannya;
4. Melakukan penyesuaian proses bisnis sesuai dengan struktur organisasi hasil penyederhanaan, kemudian menuangkan proses bisnis tersebut ke dalam SOP. Selain itu, Setjen DPR RI secara berkala juga harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP yang telah disusun untuk memastikan bahwa SOP masih relevan;
5. Memanfaatkan hasil asesmen serta pemetaan talenta yang telah dilakukan sebagai dasar pemetaan mutasi, rotasi pegawai, pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan penempatan pegawai dalam jabatan kritis dan rencana suksesi jabatan;
6. Meningkatkan kapasitas dan peran Tim Penilai Internal (TPI) agar mampu memberikan saran perbaikan bagi unit kerja dalam membangun Zona Integritas, menuju WBK/WBBM;
7. Menindaklanjuti hasil survei pengguna layanan terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Demikian laporan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami menghargai upaya Saudara dan seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya, kami mengharapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.